

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS TUMBUAN KABUPATEN SELUMA**

Oleh:

Abelia Riski Alifta. Tamrin Bangsu, Aries Munandar

Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu Kota Bengkulu, Indonesia
Email Korespondensi : Abeliariskialifta@gmail.com

Abstract

One of the health problems in Indonesia is the high rate of stunting, so the government issued Presidential Regulation Number 72 of 2021. This study aims to describe the implementation of stunting reduction programs in the Working Area of the Tumbuan Health Center, Seluma Regency. The method in this study used descriptive qualitative methods with informants totaling 23 people, determined by purposive sampling techniques. Data collection techniques are observation, interviews and documentation studies. The results of this study show that the implementation of the stunting reduction program has been implemented quite well but not optimally. This is due to several inhibiting factors such as parental parenting, low exclusive breastfeeding, high coverage of pregnant women with chronic lack of energy, and a high percentage of families who smoke. This study concluded that socialization has not been maximally accepted by the community due to community stereotypes towards the government, people who still have not participated in the implementation of the program optimally due to concurrent activities, local customs and others. Monitoring and evaluation is carried out regularly and gradually so that the puskesmas work area can implement stunting reduction programs quite well.

Key Words : *Implementation, Stunting Reduction Program; Seluma*

Abstrak

Salah satu persoalan kesehatan di Indonesia yaitu tingginya angka stunting sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program penurunan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tumbuan Kabupaten Seluma. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan berjumlah 23 orang, ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program penurunan stunting telah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat seperti pola asuh orangtua, rendahnya asi eksklusif, tingginya cakupan ibu hamil kurang energi kronis, dan tingginya persentase keluarga yang merokok. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa sosialisasi belum diterima dengan maksimal oleh masyarakat dikarenakan stereotip masyarakat kepada pemerintah, masyarakat yang masih belum mengikuti pelaksanaan program dengan maksimal dikarenakan kegiatan yang berbarengan, adat setempat dan lainnya. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan bertahap dilaksanakan sehingga wilayah kerja puskesmas dapat melaksanakan program penurunan stunting dengan cukup baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Penurunan Stunting; Seluma*

A. Pendahuluan

Stunting merupakan kegagalan tumbuh pada seorang anak yang diakibatkan oleh gizi kronis pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sehingga dapat mengganggu perkembangan kognitif dan membuat postur tubuh berpotensi tidak tumbuh optimal. Pemerintah berusaha untuk membebaskan anak dari kasus stunting untuk menuju generasi emas Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu, pemerintah mengajak multisector untuk menjalankan program penurunan stunting di Indonesia secara konvergensi, holistic, integrative dan berkualitas. Anak stunting memiliki perbedaan dengan anak normal dari tinggi badan, berat badan dan juga kecerdasan. Seperti yang dilihat dari penelitian wahyu indah 2020 bahwa kecerdasan anak stunting dibawah anak normal.

Stunting kini telah menjadi salah satu fokus pemerintah, di Indonesia angka stunting 2022 sebesar 21,6% sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan mengeluarkan juga peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021 tentang RAN PASTI sebagai acuan penurunan stunting. Provinsi Bengkulu sendiri menduduki urutan ke 25 dari 35 Provinsi di Indonesia dengan angka stunting sebesar 19,8% pada tahun 2022. Provinsi Bengkulu masih memiliki angka-angka yang cukup tinggi dalam permasalahan stunting, untuk itu pemerintah provinsi Bengkulu juga ikut melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan melaksanakan

Peraturan BKKBN Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 berisi tentang acuan untuk pelaksanaan program penurunan stunting.

Program telah dilaksanakan dalam waktu beberapa tahun belakangan dan menjadi lebih fokus sejak adanya peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga angka stunting di provinsi Bengkulu semakin menurun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada desa terbaik dalam pelaksanaan program penurunan stunting yaitu desa sakaian yang berada dalam wilayah kerja puskesmas Tumbuan. Desa sakaian berhasil menurunkan stunting sebesar 27,5% serta melaksanakan program penurunan stunting dengan sangat baik dan karena itu mendapatkan penghargaan karena keberhasilannya.

Alasan mengambil lokasi penelitian dalam wilayah kerja puskesmas karena wilayah kerja puskesmas tumbuan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu dari 72 kasus menurun menjadi 27 kasus atau sebesar 62,5% dan juga salah satu desa dalam wilayah kerja puskesmas mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik penurunan stunting tingkat provinsi pada tahun 2022. Maka dari itu peneliti menganalisis mengenai implementasi program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas tumbuan kabupaten seluma. Faktor yang membuat wilayah kerja puskesmas berhasil menurunkan kasus stunting yaitu partisipasi aktif dari pemerintah desa,

petugas puskesmas, masyarakat dan juga semua sektor yang terlibat. Petugas puskesmas memiliki kerjasama aktif dengan pemerintah desa melalui berbagai kegiatan seperti pemerintah desa yang memfasilitasi sarana dan prasarana, terlebih program pemberian makanan tambahan kepada masyarakat kelompok sasaran bersumber dari dana desa yang dikelola pemerintah desa dan makanan direkomendasikan petugas puskesmas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hasil lapangan sebagaimana adanya dan mendalaminya, kemudian menjelaskannya dengan kata-kata atau kalimat, yang kemudian menarik kesimpulan dari hasil lapangan tersebut (Sugiyono, 2020). Informan penelitian diidentifikasi melalui teknik purposive sampling, karena pertimbangan sampelnya adalah orang yang mengerti dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, informan pada penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan tambahan dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 23 orang, yaitu Kelompok sasaran program penurunan stunting sebanyak 9 orang dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Seluma terdiri dari Dinas Kesehatan 1 orang, dari Dinas BKKBN Kabupaten Seluma 1 orang, Konsultan Stunting 1 orang, PKB Kecamatan Lubuk Sandi 1 orang, pemerintah desa sebanyak 2 orang, bidan desa 1, tenaga kesehatan

puskesmas tumbuan sebanyak 2 orang beserta kader-kader stunting sebanyak 2 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabuapten Seluma waktu penelitian September 2023 sampai selesai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peneliti meneliti informan dengan melihat, mengamati, mewawancarai dan mendokumentasikan beberapa hal mengenai implementasi program penurunan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tumbuan berdasarkan batasan tahapan-tahapan implementasi menurut (Nugroho, 2017) yaitu sosialisasi, implementasi dan monitoring evaluasi.

Sosialisasi

Sosialisasi pertama diselenggarakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma yang melibatkan Petugas Gizi Puskesmas beserta Ibu dari Bayi dan Balita. Dilaksanakan setiap bulan maret dalam 1 tahun sekali, dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan yaitu pengumpulan kelompok sasaran sosialisasi dalam Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma. Dalam sosialisasi ini diberikan edukasi melalui percontohan cara program penurunan stunting dilaksanakan. Pemberian materi menggunakan alat yaitu proyektor

yang menampilkan slide power point. Dalam power point telah tersaji program yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini melibatkan lintas sektor di wilayah kerja puskesmas. Sosialisasi ini dilaksanakan setiap awal tahun sebelum program dilaksanakan dalam jangka 1 tahun. Metode yaitu dengan mengumpulkan sasaran sosialisasi dalam Aula Puskesmas Tumbuan. Adapun materi yang dibahas dalam sosialisasi yaitu program kerja dalam jangka setahun yang akan dilaksanakan oleh petugas puskesmas dengan masyarakat sebagai sasarannya.

Sosialisasi bersama lintas sektor ini dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan bantuan alat proyektor yang menampilkan power point dan alat peraga seperti alat dan bahan makanan. Pemerintah desa melakukan sosialisasi di Balai Desa masing-masing melibatkan kader dan kelompok sasaran sehingga materi tentang program sosialisasi yang disampaikan oleh petugas puskesmas dapat disampaikan kembali oleh pemerintah desa. Sosialisasi selanjutnya berjalan beriringan dengan implementasi program. dilaksanakan oleh kader stunting di desa dalam wilayah kerja puskesmas. Sosialisasi ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan oleh kader stunting. Metode dalam sosialisasi ini dengan mengunjungi rumah warga dan menggunakan teknik door to door dengan menggunakan alat berupa selebaran brosur dan pamflet yang diberikan kepada masyarakat.

Tahapan sosialisasi yang telah dijalankan sesuai dengan yang tertera dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dan peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021. Tahapan sosialisasi ini juga dilaksanakan selaras dengan teori dari Nugroho 2017. Hanya saja metode yang dilaksanakan belum optimal karena masyarakat masih memiliki mispersepsi mengenai stunting dan penanganannya juga karena belum menggunakan sarana seperti pamflet, brosur dan sarana lainnya. Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap namun tidak rutin sehingga menyebabkan cukup banyak yang belum mengerti secara rinci mengenai program penurunan stunting.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam wilayah kerja puskesmas itu selaras dengan yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 pasal 11 yang berbunyi pemerintah desa melakukan koordinasi, mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan program penurunan stunting. Dalam pasal 11 tersebut tertulis jelas bahwa pemerintah desa wajib ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Berdasarkan data empiris bahwa benar setiap pemerintah desa dalam wilayah kerja puskesmas ikut berpartisipasi secara aktif dalam program penurunan stunting. Dapat dilihat dari hasil observasi bahwa dalam setiap kegiatan program penurunan stunting hampir semua kegiatan ada pemerintah desa. Hal ini berarti pemerintah desa ikut berpartisipasi dan mengikuti aturan

yang dituliskan secara teoritis dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tersebut.

Kegiatan sosialisasi dalam pelaksanaan program penurunan stunting dilaksanakan berdasarkan dari dua hal yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Kedua peraturan ini merupakan landasan yang membuat TPPS menjalankan sosialisasi sebelum melaksanakan implementasi dalam wilayah kerja puskesmas. Sosialisasi ini juga telah menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dari hasil penelitian, wawancara bersama Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, informan RZ mengatakan sosialisasi penting dilakukan sebelum dilaksanakannya implementasi. Maka dari itu informan RZ bersama dengan rekan kerjanya selalu memberikan sosialisasi secara detail dan merata sebelum melaksanakan program.

Sosialisasi yang telah digunakan juga sesuai dengan indikator sosialisasi dari Nugroho yaitu sosialisasi dilaksanakan dengan metode-metode yang sesuai dengan teori. Metode sosialisasi dalam wilayah kerja puskesmas yaitu dengan menggunakan seminar, konferensi atau pertemuan, brosur, pamflet dan spanduk. Materi yang diberikan juga menggunakan proyektor cukup besar sehingga dapat dilihat oleh masyarakat walaupun dari belakang. Sosialisasi ini tidak dilaksanakan dengan melibatkan media massa. Sosialisasi

ini belum maksimal dilaksanakan karena masyarakat yang masih menstereotip sosialisasi hanya menjadikan masyarakat sebagai objek. Padahal seharusnya sosialisasi dapat dilaksanakan dengan maksimal agar masyarakat dapat mengerti secara terperinci mengenai program.

Penelitian Andika Yuli dan kolega (2023) berjudul “Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar”, merupakan penelitian yang memiliki hasil sama dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti. Hasilnya yaitu keberhasilan Kabupaten Kampar dalam percepatan penurunan stunting juga adanya peran serta masyarakat melalui KPM yang aktif melakukan beberapa tugas yaitu; sosialisasi gerakan peduli tetangga dan bahaya stunting, pengumpulan data terkait percepatan penurunan stunting dan juga meningkatkan literasi masyarakat tentang stunting. Dengan sosialisasi yang diberikan membuat masyarakat memiliki pemahaman mengenai stunting sehingga dapat mempermudah dalam pengimplementasian program penurunan stunting. Seperti informan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andika yang terbukti meningkatkan pengetahuan setelah diberikan edukasi, maka begitu pula dengan masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi secara rutin dan berkala untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai

program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas.

Implementasi

Implementasi yang dilakukan melibatkan seluruh kelompok sasaran yang tertera dalam Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 yaitu, remaja, calon pengantin, pasangan usia subur dan ibu hamil, bayi baru lahir serta balita. Remaja, adanya posyandu remaja dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas, disini remaja diperiksa tekanan darahnya, pemeriksaan anemia, bimbingan mengenai kebersihan alat reproduksi dan lainnya. Melibatkan perangkat desa, bidan desa, kader remaja dan remaja sebagai kelompok sasaran. Calon Pengantin, kegiatannya yaitu pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tumbuan, suntik TT 1 sebelum menikah, pemberian tablet tambah darah, pemberian edukasi mengenai pencegahan stunting dan dilakukan tiga bulan sebelum menikah. PUS, diberikan pemeriksaan kesehatan dan tablet tambah darah agar Pasangan Usia Subur (PUS) dapat mempersiapkan diri menghadapi kehamilannya dan juga diberikan materi mengenai cara mengasuh anak agar Pasangan Usia Subur (PUS) dapat memberikan pola asuh sesuai yang dibutuhkan anak.

Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan seperti cek tensi darah dan cek HB, pemberian susu hamil sebulan sekali, pemberian makanan tambahan sebulan sekali, pemberian vitamin serta tablet tambah darah 90 tablet untuk 9 bulan. Bayi baru lahir,

kunjungan ke rumah warga yang baru melahirkan sekalian untuk memberikan edukasi mengenai asi eksklusif, edukasi mengenai pola asuh berdasarkan umur anak, pemeriksaan kesehatan bayi sebulan sekali di posyandu, pemberian vitamin a dan suntik imunisasi. Balita diberikan program asi eksklusif, makanan tambahan, vitamin dan suplemen, obat cacing, obat anti diare dan obat malaria. Khusus untuk ibu hamil yang memiliki lingkaran lengan dibawah 23,5 cm mendapatkan makanan tambahan selama 90 hari. Makanan dimasak oleh kader dan diberikan kepada ibu hamil 1x sehari. Balita stunting juga mendapatkan makanan tambahan seperti ibu hamil selama 30 hari dan 2x sehari. Makanan dimasak oleh kader atas rekomendasi petugas gizi puskesmas. Sehingga makanan yang dimasak jelas kandungan gizinya. Hal ini bertujuan agar ibu hamil keK dan balita stunting memiliki berat badan dan ukuran yang normal untuk pengoptimalan tumbuh kembang anak.

Tahapan implementasi telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 secara merata dalam wilayah kerja puskesmas. Implementasi dalam wilayah kerja puskesmas ini dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan angka stunting dalam wilayah kerja puskesmas dengan cukup signifikan dan dibuktikan dengan adanya desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam

penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.

Implementasi dalam wilayah kerja puskesmas ini dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan angka stunting dalam wilayah kerja puskesmas dengan cukup signifikan dan dibuktikan dengan adanya desa yang mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam penurunan stunting di Provinsi Bengkulu. Salah satu desa yang mendapatkan penghargaan ini bernama Desa Sakaian. Selain mengimplementasikan program pokok untuk kelompok sasaran dengan baik, Desa Sakaian juga melaksanakan kegiatan seperti penanaman bibit sayuran, pemberian bibit hewan ternak, pembuatan jamban dan kegiatan lainnya. Sehingga Desa Sakaian mendapatkan penghargaan sebagai desa terbaik dalam penurunan stunting tingkat Kabupaten Seluma tahun 2022, tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022 hingga mendapatkan Rakornas dalam program penurunan stunting pada tahun 2023.

Keberhasilan program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas ini dilatarbelakangi dengan adanya partisipasi aktif dari petugas puskesmas, pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu adanya kerjasama lintas sektor secara konvergensi, holistik, integratif dan berkualitas sehingga terciptanya penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas secara signifikan. Program penurunan stunting ini memiliki dana dari dana desa

sehingga peran pemerintah desa sangat besar dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Turunnya angka stunting juga karena gizi bayi dan balita yang semakin bagus. Peningkatan gizibalita ini merupakan keluaran dari kegiatan makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah desa dan juga petugas puskesmas sehingga angka stunting dalam wilayah kerja puskesmas semakin menurun.

Penelitian Fathia dan kolega (2023) berjudul “Implementasi Program Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting Di Kota Pekanbaru”, selaras dengan hasil dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian Fathia menjelaskan bahwa Implementasi program gizi oleh Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, tetapi hasilnya belum maksimal. Terlihat masih adanya kasus stunting di wilayah Kota Pekanbaru. Terdapat 3 faktor yang menghambat implementasi program gizi dalam penanganan stunting di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menemukan bahwa implementasi program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas telah dilaksanakan dengan baik namun masih harus diberikan evaluasi sehingga nantinya memiliki hasil lebih maksimal. Program yang telah disiapkan merupakan program yang tepat untuk menunjang kehidupan bayi dan balita untuk menjadi

sumber daya manusia emas bagi Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa juga stunting tidak sepenuhnya mempengaruhi perkembangan pada bayi dan balita tetapi hanya pada beberapa bagian saja dan apabila pemberian program dijalankan dengan baik, maka bayi dan balita stunting tetap dapat menjadi normal, sehat dan cerdas. Dalam wilayah kerja puskesmas cukup banyak bayi dan balita yang dulunya stunting dan sekarang sudah menjadi bayi dan balita normal. Perbedaannya yaitu selain pada tinggi dan berat badan juga pada perkembangan otak. Balita normal lebih dapat merekam memori dengan lebih baik sehingga memiliki kemampuan mengingat lebih baik. Selain itu juga balita normal lebih aktif dan ceria dibandingkan balita stunting.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring ini dilakukan secara berkala. Melibatkan kader, pemerintah desa, petugas puskesmas, PKB kecamatan lubuk sandi, dinas kesehatan dan bkbbn kabupaten selama. Monitoring pertama dilaksanakan oleh kader stunting dalam wilayah kerja puskesmas teknik door to door atau mendatangi rumah warga secara khusus, dilaksanakan minimal sebulan sekali guna melakukan pemeriksaan mengenai program yang telah diimplementasikan. Pemerintah Desa memonitoring mengenai program penurunan stunting secara langsung dalam kegiatan posyandu

juga kegiatan bersama kader. Monitoring juga dapat dilaksanakan melalui online, yaitu melalui Aplikasi ELSIMIL yang merupakan aplikasi milik BKKBN. Aplikasi Elsimil dapat digunakan oleh kader, pemerintah desa dan PKB Kecamatan sehingga data kelompok sasaran dapat dilihat secara berkala dan digital. Petugas puskesmas mendatangi rumah kelompok sasaran seperti ibu melahirkan dengan melihat perkembangan bayi minimal 1 bulan sekali dan juga memantau melalui aplikasi. Petugas puskesmas setiap bulannya juga mengisi aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Aplikasi ini bernama e-PPGBM itu yang memonitor petugas Dinas Kesehatan.

Evaluasi merupakan lanjutan dari tahapan monitoring. Bahan evaluasi merupakan hasil monitoring sehingga dengan adanya monitoring secara berkala dapat membuat bahan untuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan lebih optimal. Evaluasi pertama dilaksanakan oleh pemerintah desa serta kader. Adapun evaluasi dilakukan dengan cara membuat kegiatan bernama Rembuk Stunting. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk membahas program apa yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan di desa tersebut. Petugas puskesmas akan melakukan evaluasi setiap 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan februari dan agustus mengenai data kelompok sasaran dan juga implementasi program stunting. Evaluasi ini juga akan dilakukan oleh

Dinas Kesehatan dan BKKBN Kabupaten Seluma bersama dengan Tim Percepatan Stunting lainnya. Kegiatannya bernama audit program. kegiatan ini bertujuan untuk meninjau kembali program-program yang diimplementasikan dalam satu tahun sehingga untuk tahun berikutnya program dapat diberikan dalam bentuk yang lebih optimal.

Tahapan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dan peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021. kader, pemerintah desa, petugas puskesmas dan seluruh TPPS telah menjalankan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya data resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma mengenai angka stunting di wilayah kerja puskesmas. Adanya kegiatan seperti rembuk stunting dan audit stunting merupakan implementasi dari peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 dan peraturan BKKBN RI Nomor 12 tahun 2021 dalam tahapan monitoring evaluasi oleh TPPS.

Monitoring dan evaluasi program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas dilaksanakan secara rutin dan bertahap. Semua sektor dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi ini sehingga semua sektor dapat mengetahui mengenai kekurangan dari program penurunan stunting yang dilaksanakan dalam satu tahun. Hal ini dilakukan karena berlandaskan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12

Tahun 2021. Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tertulis bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi wajib dilakukan dan penting untuk dilakukan. Sehingga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dengan rutin dan teratur oleh sektor-sektor terlibat sehingga dalam sebulan sekali dalam posyandu disampaikan mengenai hasil monitoring sebagai bahan untuk evaluasi informal. Biasanya hasil monitoring sebagai bahan evaluasi ini disampaikan oleh kader kepada pemerintah desa dan petugas puskesmas sehingga setiap bulan adanya sosialisasi mengenai program penurunan stunting secara informal dari petugas kesehatan dengan tujuan agar implementasi program penurunan stunting di masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas semakin optimal.

Penelitian Vista dan kolega (2023) berjudul “Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya”, diperoleh kesimpulan dalam implementasian program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) peneliti menemukan bahwa pelaksanaannya belum terlaksana dengan sempurna, hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan program. dapat dilihat

bahwa implementasi program penurunan stunting lokasi manapun di Indonesia tetap sama. Program yang diberikan sama rata tetapi mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan partisipasi pada setiap sektor berbeda-beda. Selain itu struktur masyarakat, ekonomi, budaya, agama dan karakteristik juga membuat beberapa perbedaan dalam implementasi program penurunan stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 merupakan landasan teraktual dalam mengimplementasikan program penurunan stunting.

Dalam wilayah kerja puskesmas kader, pemerintah desa, PKB kecamatan, petugas kesehatan puskesmas sudah melaksanakan perannya dengan sangat baik. Semua sektor yang terlibat juga telah menjalankan semua peran dengan baik. Dalam hal ini juga program penurunan stunting telah disalurkan dengan adil dan merata pada setiap kelompok sasaran. Semua kelompok sasaran telah diberikan program sesuai porsinya masing-masing. Namun sayangnya ada beberapa hal yang membuat program ini belum optimal dilaksanakan, yaitu pola asuh yang masih salah, ibu hamil ke yang masih tinggi, rendahnya asi eksklusif dan tingginya keluarga yang merokok. Beberapa hal ini membuat program penurunan stunting kurang optimal.

Faktor-faktor penghambat tersebut dikarenakan kelompok sasaran yang masih kurang

teredukasi sehingga masih memerlukan banyak perbaikan dalam program penanganan stunting dalam wilayah kerja puskesmas. Pola asuh merupakan hal yang penting dalam kehidupan seorang anak. Pola asuh menyangkut pada tumbuh kembang, sifat, sikap dan kelakuan anak sehari-hari. Dalam wilayah kerja puskesmas rata-rata memiliki ibu yang bekerja. Pekerjaan ibu ini menyebabkan anak minin mendapatkan asi eksklusif dan ibu kurang berpartisipasi dalam pola asuh. Rata-rata anak dalam wilayah kerja puskesmas diasuh oleh neneknya. Seperti yang kita ketahui bahwa usia lansia sudah banyak lupa dan terkesan sembarangan. Begitu pula dengan nenek yang memberikan makan anak-anak dalam wilayah kerja puskesmas sembarangan, tidak memperhatikan nutrisi dan kebanyakan makanan karbohidrat sehingga anak rentan mengalami stunting.

Selain itu faktor rokok juga merupakan faktor penting penghambat program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas. Sangat banyak keluarga yang merokok dalam wilayah kerja puskesmas. Tercatat dalam data puskesmas tahun 2022, presentase keluarga merokok sebesar 67%. Hal ini merupakan angka yang cukup tinggi. Anak-anak yang terpapar asap rokok memiliki resiko lebih tinggi terkena stunting. Rokok dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tulang anak sehingga anak akan sukar untuk tumbuh tinggi dan menyebabkan anak mengalami stunting.

Dikarenakan hal ini maka faktor penghambat program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas juga dikarenakan oleh keluarga merokok.

Faktor penghambat lainnya yaitu ibu hamil KEK. Ibu hamil KEK ialah Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang memiliki lingkaran lengan atas dibawah 23,5 cm. Tingginya angka ibu hamil KEK ini merupakan salah satu faktor penghambat program penurunan stunting dalam wilayah puskesmas. Ibu hamil KEK memiliki banyak resiko seperti bayi lahir prematur atau kurang bulan, terhambatnya perkembangan otak janin, bayi lahir dengan berat badan rendah dan beresiko stunting. Maka dari itu petugas kesehatan puskesmas beserta kader dan pemerintah desa bersama-sama memberikan makanan tambahan serta memonitoring secara rutin ibu hamil KEK.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi program penurunan stunting dalam wilayah kerja Puskesmas Tumbuan Kabupaten Seluma sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih ada perbedaan persepsi dalam masyarakat di wilayah kerja puskesmas mengenai kasus stunting. Implementasi program juga telah dilaksanakan dengan baik tetapi juga ada hal-hal yang harus diperbaiki agar lebih optimal. Semua kelompok sasaran telah terdata oleh pemerintah

desa dalam wilayah kerja puskesmas sehingga telah mendapatkan manfaat dari program penurunan stunting. Adapun beberapa faktor penghambat dalam implementasi program seperti, kesalahan pada pola asuh, rendahnya asi eksklusif, tingginya cakupan angka Ibu hamil KEK dan tingginya persentase keluarga yang merokok. Selain itu kurang maksimal implementasi program penurunan stunting juga dikarenakan tingginya angka ibu yang bekerja sehingga meninggalkan anaknya bersama nenek atau anggota keluarga lain yang kurang mengerti mengenai pola asuh anak termasuk untuk pemenuhan nutrisi harian. Masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas rata-rata merupakan Suku Serawai. Adat dalam Suku Serawai salah satunya yaitu pernikahan dilaksanakan paling lambat satu bulan sejak lamaran, ini menyebabkan calon pengantin tidak maksimal dalam mendapatkan program. Kepala Desa memiliki hak prerogatif yang membuat Kepala Desa dapat mengganti kader-kader sesuai dengan keinginannya. Hal ini menyebabkan cukup banyak kader baru dalam wilayah kerja puskesmas, sehingga belum memahami secara rinci mengenai program penurunan stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin.

Rekomendasi/Saran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma bersama Petugas Puskesmas dan instansi lain yang

- terkait mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader stunting di desa dalam wilayah kerja puskesmas agar kader lebih mengerti secara detail mengenai program penurunan stunting. Hal ini dikarenakan pada hasil penelitian ditemukan ada beberapa kader baru yang belum mengerti detail mengenai program penurunan stunting.
2. Pemberian sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma kepada Petugas Puskesmas hendaknya dilakukan secara rutin dan bertahap sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan lebih optimal.
 3. Petugas Puskesmas Tumbuan dapat memberikan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi secara detail untuk menyamakan persepsi antara masyarakat dengan pemangku program mengenai program penurunan stunting. Hal ini karena perbedaan persepsi mengenai program membuat masyarakat kurang maksimal dalam melaksanakan program, sehingga program penurunan stunting dalam wilayah kerja puskesmas tidak dilaksanakan dengan optimal. Penyampaian dalam sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi dapat menggunakan bahasa daerah karena lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Waktu dilaksanakan lebih baik jika di hari kamis karena hari kamis merupakan hari pasar sehingga masyarakat kerap

berada di rumah. Lokasi pelaksanaan bisa menggunakan Aula Kecamatan atau Aula Puskesmas.

4. Tim Percepatan Penurunan Stunting dapat melakukan evaluasi mengenai program untuk kelompok sasaran calon pengantin. Hendaknya diberikan ruang khusus untuk melaksanakan diskusi bersama antara Ketua Adat, Petugas Puskesmas dan instansi yang terlibat agar nantinya mendapatkan kesepakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Agustino, L. (2004) 'Dasar-Dasar Kebijakan Publik', pp. 140–144.
- BKKBN (2021) 'Buku Pintar Stunting', Buku Pintar Stunting Edisi 1 [Preprint].
- Kemenkes (2023) 'Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022', Kemenkes, pp. 1–7.
- Nugroho, R. (2017) 'Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik', Jakarta: Elex Media Komputindo, 1, p. 39.
- Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Jurnal/Media Massa dan Media Sosial

- Fadlyansyah, M.H. and Joni, M. (2020) 'Kesehatan Anak Di Indonesia (Stunting)', 1(2), pp. 1–10.
- Pratama, A.Y. et al. (2023) 'Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar', ... Seminar Nasional Unars, pp. 258–266.
- Rofi'ah, K. and Munir, M. (2019) 'Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh:

Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber', *Justicia Islamica*, 16(1), pp. 193–218. Available at: <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1640>

Septianingrum, S.H. et al. (2023) 'Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PEPES) Dalam Menurunkan Angka Stunting Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya, pp. 1–11.

Dokumen dan Undang-Undang

Keputusan Bupati Seluma Nomor 474-284 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting.

BKKBN, P.B. et al. (2021) 'Perban 12 Ran Pasti', *Bkkbn*, pp. 1–162.